

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi sungai Siak, menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau ( Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar ), kawasan ini di namai dengan Pekanbaru, dan di kemudian hari di peringati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan *Besult van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada Tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai Tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *onderafdeling* Kampar Kiri sampai Tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer yang disebut *gokung* .([http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru.com](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru.com))

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama: Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi *Gun* yang dipakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau Syutjoukang. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi: Hermente Pekanbaru ibu kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei Tahun 1964.

1. Kota kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}-14^{\circ}$  -  $101^{\circ}-34^{\circ}$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}-25^{\circ}$  lintang utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km<sup>2</sup> dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali di mekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel IV. 1 : Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase %
1.	Pekanbaru kota	2,26	0,36 %
2.	Senapelan	6,65	1,05 %
3.	Sukajadi	5,10	0,81 %
4.	Limapuluh	4,04	0,64 %
5.	Sail	3,26	0,52 %
6.	Rumbai	105,23	16,64 %
7.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30 %
8.	Bukit Raya	94,56	14,96 %
9.	Tenayan Raya	108,84	17,21 %
10.	Marpoyan Damai	89,86	14,21 %
11.	Tampan	63,08	9,98 %
12.	Payung Sekaki	52,63	8,32 %
Jumlah		632,26	100 %

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari data diatas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 108,84 Km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan jumlah penduduk 799.213 jiwa, kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

## **B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru**

**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** (Disbudpar) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan beragam aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang kemudian diaktualisasikan oleh pemerintahan daerah melalui lembaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016, serta Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Secara hierarkis, kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan 2 urusan penting pemerintahan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Secara struktural lembaga ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Visi Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru**

**DINAS** Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Pekanbaru berupaya mewujudkan daerah ini menjadi pusat peradaban kebudayaan Melayu modern, tangguh menghadapi tantangan global, berkarakter religius dan berjati diri Melayu.

Keinginan tersebut bukan sesuatu yang tanpa dasar, tetapi sejurus atau mengacu kepada Visi Kota Pekanbaru 2021 yaitu "*Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai*

***Pusat Perdagangan dan Jasa, serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa,"***

Pernyataan visi diatas mengandung makna berupaya Mewujudkan:

1. Kota Pekanbaru Menjadi Pusat Kebudayaan Melayu
2. Pekanbaru Kota Wisata yang Bernuansa Melayu
3. Pekanbaru Kota Berlandaskan Iman dan Taqwa

Mewujudkan visi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru kini tengah berupaya membawa organisasi kepada tujuan pencapaian visi yang fokus.

1. Melestarikan, Membina dan Mengembangkan Budaya Melayu di Tengah-Tengah Masyarakat
2. Mengembangkan Industri Pariwisata Berdaya Saing dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Bernuansa Melayu
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki 6 struktur internal meliputi;

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat, membawahi:**

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program

**c. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi:**

1. Seksi Kesenian
2. Seksi Nilai-Nilai Budaya
3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

**d. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi:**

1. Seksi Promosi
2. Seksi Bimbingan Masyarakat
3. Seksi Informasi dan Dokumentasi

**e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi:**

1. Seksi Jasa Pariwisata
2. Seksi Rekreasi dan Hiburan
3. Seksi Sarana dan Prasarana

**f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kepariwisataan, membawahi:**

1. Seksi Data dan Pengkajian
2. Seksi Kelembagaan
3. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia

**g. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)**

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Semua urusan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru memegang prinsip kehati-hati-hatian, transparan dan akuntabel, dengan tujuan akhir mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, pusat penyelenggaraan kegiatan kebudayaan Melayu dan Aktivitas Kepariwisataan MICE di Riau.

**Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota**

**Pekanbaru**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 111 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU**

